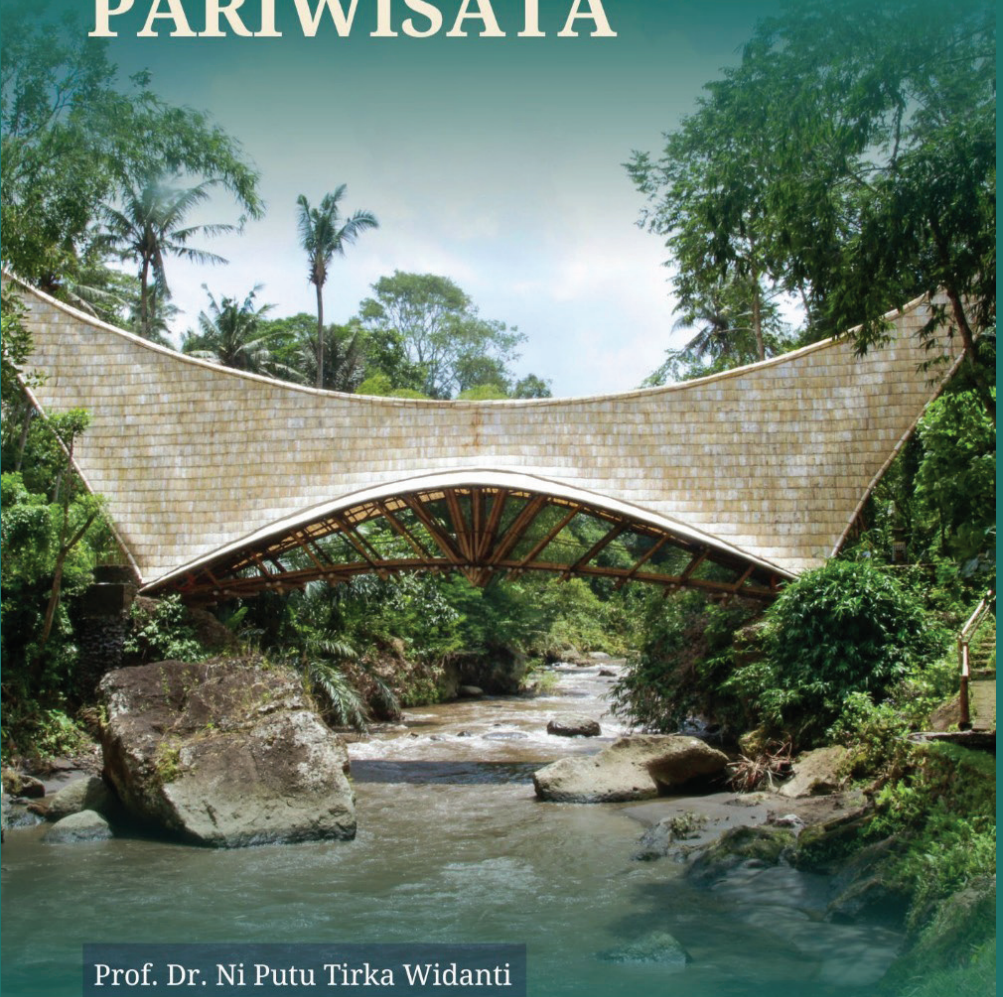




KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA



Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti

Year 2024/2025

**BUKU AJAR
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PARIWISATA**

Diterbitkan oleh:

UNR Press

Jl. Padma-Kampus Universitas Ngurah Rai, Lingkungan Saba, Kel.

Penatih, Kec. Denpasar Timur, Bali.

Telp. Telp (0361) 462617

Email: info@unr.ac.id

Copyright © 2024 UNR Press

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk

Apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

All right reserved

Penulis:

Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti

Tim Editor:

Yudistira Adnyana

I Made Kartika

I Made Adi Suwandana

Made Prarabda Karma

Ilustrasi dan Sampul Buku

I Putu Gede Pande Wiratama

Tata Letak dan layout

I Putu Gede Pande Wiratama

ISBN: 978-602-72208-7-4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, buku Kebijakan Pembangunan Pariwisata ini dapat hadir untuk melengkapi khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan perkuliahan bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Buku ini berisikan teori dan aplikasi/praktik teori yang dapat dijadikan oleh masyarakat umum serta mahasiswa sebagai pegangan sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan. Bagi mahasiswa buku ini dirancang untuk dapat juga sebagai sumber belajar karena diambil dari berbagai sumber antara lain artikel, jurnal, google dan Wikipedia. Buku ini tidak selengkap buku sumber belajar yang dianjurkan, dengan kata lain buku Kebijakan Pembangunan Pariwisata ini di-

susun untuk membantu dalam memahami materi perkuliahan serta mendukung pengalaman belajar (praktikum) para mahasiswa. Melalui buku ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan suatu kebiasaan yang baru yaitu gemar membaca sebelum terjun ke lapangan.

Kami menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Karenanya kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, terutama dari para mahasiswa, untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 24 September 2024

Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	ix
A. Deskripsi Singkat	ix

BAB I

KONSEP DASAR KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI PARIWISATA	1
A. Konsep Dasar Kepariwisataan	1
B. Pengertian Pariwisata	2
C. Wisatawan	3
D. Karakteristik Pariwisata	4
	V

E. Komponen Pariwisata	6
F. Bentuk Pariwisata	7
G. Dampak Pariwisata	13
H. Manfaat Ekonomi Pariwisata	15

BAB II

PERAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN 17

A. Peran Pariwisata dalam Pembangunan	17
B. Pemasukan Devisa dari Pariwisata untuk Pembangunan	22
C. Keberhasilan Pariwisata dalam Pembangunan	23

BAB III

KEBIJAKAN DAN REGULASI 27

A. Kepariwisataan	27
B. Pemerintah dan Kebijakan Pariwisata	27
C. Kebijakan dalam Aspek Ekonomi	34
D. Keberlanjutan dalam Aspek Sosial Budaya	36
E. Keberlanjutan dalam Aspek Lingkungan	38

BAB IV

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 41

A. Konsep Pariwisata Dalam Pandangan Teologis	41
B. Pariwisata Religius	42
C. Etika Pariwisata dalam Agama	42

D. Pariwisata Spiritual	43
E. Keberlanjutan Antar Budaya dan Dialog Antar Agama	43
F. Konsep Pariwisata dalam Pandangan Filosofi	44
G. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Keadilan	46

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PARIWISATA 51

A. Pemberdayaan Masyarakat	51
B. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	53

Pustaka	61
Lampiran	65

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pariwisata mengacu pada pergerakan orang-orang melintasi kota-kota, negara-negara, atau batas-batas. Seiring orang terus bepergian untuk pekerjaan dan kesenangan, prospek masa depan pariwisata lebih cerah dari sebelumnya. Kita semua pernah berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata setidaknya sekali. Anda mungkin pernah melihat bahwa banyak orang menyediakan layanan dalam kegiatan pariwisata ini: agen perjalanan, pemandu, perusahaan transportasi, pengguna, penjual souvenir, dll. Pariwisata telah menjadi lebih dari sekadar sektor ekonomi dan telah berkembang menjadi bagian penting dari dasar ekonomi banyak negara. Di dunia modern, industri pariwisata

utamanya berkolaborasi dengan lebih dari tujuh industri lainnya, seperti penerbangan, manajemen objek wisata, agen perjalanan, produksi kerajinan tangan, dan produksi souvenir untuk pengunjung dan objek wisata terdekat. Ini berubah dan berkembang karena keterkaitannya.

Mengingat masalah ini lebih rinci, kita menemukan bahwa dalam definisi istilah «pariwisata» kita termasuk orang-orang yang mengikuti konferensi, pertemuan bisnis, jenis kegiatan bisnis atau profesional lainnya, serta orang-orang yang mengikuti studi wisata domestik. Seseorang menjadi pelancong ketika dia dengan sukarela meninggalkan lingkungan normal tempat dia tinggal untuk mengunjungi lingkungan lain. Oleh karena itu, wisatawan adalah pengunjung dan apa yang mereka lakukan ketika mengunjungi tempat lain dianggap sebagai pariwisata. Kembali pada tahun 1963, Konferensi Internasional PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata setuju untuk menggunakan istilah «pengunjung» (selain «penduduk») untuk menggambarkan orang-orang yang mengunjungi negara-negara lain. Oleh karena itu, pelancong bisnis membutuhkan transportasi yang sering dan teratur, layanan yang efisien dan dapat diandalkan, serta pilihan akomodasi yang baik (dalam hal kamar dan makanan) di destinasi mereka dengan standar tinggi.

Produk pariwisata mengacu pada seluruh rangkaian layanan dan produk yang dikonsumsi oleh wisatawan.

X

Tidak mungkin mendefinisikan industri pariwisata yang berbeda karena ada berbagai produk dan layanan terkait pariwisata. Pariwisata adalah pergerakan orang yang sangat besar dalam dan melintasi batas-batas nasional. Ini menciptakan kebutuhan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pariwisata. Untuk tujuan analisis statistik dan pemahaman arus wisatawan. Secara khusus, ini digunakan untuk menghitung dampak ekonomi dari setiap kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan. Dengan beberapa kegiatan bisnis terkait pariwisata, industri ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa. Pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan menikmati perjalanan bersama untuk mencapai tujuan khusus melegakan kebosanan dan kelelahan kehidupan sehari-hari.

Pengembangan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara terencana untuk membawa perubahan, dengan tujuan utama meningkatkan standar hidup, kesejahteraan, dan kualitas masyarakat. Banyak pengembangan memiliki potensi untuk melibatkan masyarakat, dan pengembangan di sektor pariwisata khususnya tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dan layanan untuk berperan aktif dan mendukung kemajuan pariwisata lokal.

Pariwisata dianggap memainkan peran dalam pengembangan sebagai «mesin ekonomi» yang menghasilkan devisa bagi perkembangan ekonomi negara-negara

termasuk Indonesia. Ini berarti bahwa pariwisata adalah faktor penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara, karena mempromosikan pengembangan beberapa sektor ekonomi nasional, seperti: Peningkatan ekonomi melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur, munculnya industri baru, peningkatan produk pertanian dan peternakan, peningkatan pengakuan internasional terhadap produk lokal, dan peningkatan permintaan untuk souvenir, seni, lukisan, dan kerajinan. Selain itu, pariwisata secara signifikan meningkatkan pendapatan devisa, pajak, dan pendapatan nasional suatu negara.

Pada dasarnya, sektor pariwisata perlu dipasarkan dengan baik agar dikenal oleh setiap wisatawan di seluruh dunia, termasuk wisatawan domestik dan internasional, dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan. Kesuksesan pariwisata sebagian besar bergantung pada orang-orang yang terlibat dalam manajemen pariwisata. Realisasi pariwisata adalah interaksi sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata, karena dimensi manusia adalah kekuatan penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata.

KONSEP DASAR KEPARIWISATA- AN DAN EKONOMI PARIWISATA

A. KONSEP DASAR KEPARIWISATAAN

Konsep dasar pariwisata didasarkan pada pergerakan orang-orang diluar tempat tinggalnya sendiri yaitu daerah rumah. Oleh karena itu pariwisata dianggap sebagai pergerakan manusia di dalam kota, negara bagian, negara atau lintas batas internasional. Pariwisata telah berkembang menjadi aktivitas yang benar benar mendunia batas politik, ideologis, geografis, budaya. Prospek masa depan pariwisata lebih cerah dari sebelumnya karena orang terus melakukan perjalanan untuk bekerja atau bersenang-senang.

Kita pada satu waktu atau waktu lainnya telah mengambil bagian dalam suatu kegiatan pariwisata. Dalam setiap kegiatan wisata tersebut anda pasti sudah memperhatikan bahwa banyak orang yang terlihat dalam penyediaan jasa seperti biro perjalanan, guide, transporter, user, penjual souvenir dan lain sebagainya. Pariwisata telah menjadi lebih dari sekedar industri itu telah berkembang menjadi bagian penting dari fondasi ekonomi banyak negara. Di dunia modern , industri pariwisata terus berubah dan berkembang terutama karena keterkaitannya dengan lebih dari tujuh industri lain seperti penerbangan , manajemen atraksi, fasilitator perjalanan, produsen kerajinan tangan dan souvenir yang dirancang untuk pengunjung dan outlet terdekat dan pemahaman terdekat menjadi sangat menarik.

B. PENGERTIAN PARIWISATA

Pengertian Pariwisata diartikan sebagai aktivitas menikmati perjalanan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu melepaskan kejenuhan dan kepenatan dari kehidupan sehari-hari.

Beberapa pengertian pariwisata menurut para ahli, yaitu :

1. Yoeti (2008) menyatakan pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat

ke tempat lain, selain itu pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*), atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

2. Zalukhu dan Meyers (2009) menyatakan pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.
3. Sinaga (2010) mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.

C. WISATAWAN

Individu menjadi wisatawan ketika mereka secara sukarela meninggalkan lingkungan normalnya, tempat mere-

ka tinggal, untuk mengunjungi lingkungan lain. Hall and Williams, 2019). Oleh karena itu, turis adalah pengunjung, dan apa yang mereka lakukan saat mengunjungi tempat lain dapat dianggap sebagai pariwisata. Kembali pada tahun 1963, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjalanan dan Pariwisata Internasional (*United Nations Conference on International Travel and Tourism*) setuju untuk menggunakan istilah pengunjung (*visitors*) (selain penduduk) untuk menggambarkan individu yang mengunjungi negara lain. Dalam hal ini, mungkin ada waktu perjalanan yang cukup besar. Oleh karena itu, pelancong bisnis membutuhkan kemudahan fasilitas transportasi yang sering dan teratur, layanan yang efisien, dapat diandalkan, dan fasilitas akomodasi yang baik (dalam hal akomodasi dan catering) berstandar tinggi, di tempat tujuan.

Di sisi lain perjalanan rekreasi sangat elastis bagi wisatawan yang sensitif terhadap harga. Harga lebih rendah untuk liburan ke tujuan tertentu biasanya akan meningkatkan jumlah keseluruhan wisatawan.

D. KARAKTERISTIK PARIWISATA

Produk wisata adalah total jasa dan produk yang dikonsumsi oleh wisatawan. Transportasi internasional merupakan bagian integral dari produk wisata. Karena keberadaan berbagai produk, jasa yang terlibat dalam pariwisata,

seseorang tidak dapat menentukan dan mendefinisikan industri pariwisata yang berbeda. Melainkan ada industri, sektor dan jasa yang melayani kebutuhan para pelancong.

Ada beberapa karakteristik pariwisata yang membedakannya dari kegiatan ekonomi lainnya, diantaranya yaitu (Hall and Williams,2019):

1. Pariwisata adalah kegiatan ekspor yang tidak terlihat.
2. Produk dan layanan saling melengkapi.
3. Tidak ada industri khusus yang hanya memproduksi untuk pariwisata.
4. Produk pariwisata mudah rusak
5. Arah atraksi adalah terbalik
6. Perantara dalam konsumsi
7. Produk wisata terfragmentasi
8. Berpergian dalam sebuah pengalaman
9. Usaha di industri pariwisata

Pariwisata dicatat dalam statistik sebagai <tidak terlihat>. Wisatawan mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi di negara mereka dengan penekanan pada layanan dan barang rekreasi dan waktu luang. Permintaan dalam pariwisata bukan untuk produk tertentu melainkan untuk paket komoditas jasa dan konsumsi. Jasa-jasa yang membentuk

produk wisata akhir berbeda satu sama lain dan sekilas tampak tidak bergantung satu sama lain. Itulah sebabnya destinasi berasumsi bahwa mereka dapat mengontrol permintaan pariwisata dan harga produk wisata yang mereka tawarkan ke pasar internasional. Jasa pariwisata yang berbeda saling melengkapi dan berkaitan erat satu sama lain membentuk produk akhir wisata bagi wisatawan.

E. KOMPONEN PARIWISATA

Empat komponen dasar pariwisata yaitu transportasi, atraksi, akomodasi dan jasa penunjang merupakan komponen yang sangat penting. Unsur-unsur inilah yang menjadi daya tarik utama pariwisata, yaitu :

1. Cuaca yang menyenangkan/ menggembirakan (*pleasing weather*)

untuk liburan, cuaca yang baik merupakan bahan yang sangat penting dalam liburan yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan.

2. Daya Tarik pemandangan (*scenic attractions*)

Daya tarik pemandangan wisata seperti cuaca bagus merupakan faktor yang sangat penting dalam pariwisata. Pemandangan atau bentang alam yang terdiri dari pegunungan, danau, air terjun, gletser,

hutan, gurun, dll merupakan kekuatan yang kuat untuk menarik orang untuk mengunjunginya.

3. Faktor sejarah dan budaya (*historical and cultural factors*)

Karakter kepentingan sejarah dan budaya memberikan daya tarik yang kuat bagi banyak orang. Banyak negara yang sedang mengembangkan industri pariwisata menggunakan peninggalan sejarah masa lalu mereka sebagai tempat wisata utama mereka.

4. Aksesibilitas (*accessibility*)

Aksesibilitas merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan sarana yang digunakan wisatawan untuk mencapai daerah tempat atraksi berada.

5. Fasilitas (*amenities*)

Fasilitas merupakan bantuan yang diperlukan untuk pusat wisata. Untuk resort tepi laut, fasilitas seperti berenang, berperahu, berperahu pesiar, bersejelan, dan fasilitas lain seperti menari, rekreasi dan hiburan penting untuk setiap pusat wisata.

F. BENTUK PARIWISATA

Pariwisata adalah pergerakan manusia dalam jumlah besar, di dalam dan melintasi batas negara. Ini mengarah pada kebutuhan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk

pariwisata; untuk tujuan dari analisis statistik dan pemahaman arus pariwisata; terutama untuk tujuan menghitung dampak ekonomi dari setiap aktivitas pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan.

Tiga bentuk dasar pariwisata direvisi dari sebelumnya dan diperbarui sebagai (Hall and Williams, 2019) :

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang tiga bentuk dasar pariwisata berdasarkan revisi dari Hall and Williams (2019):

1 Pariwisata Domestik

Merupakan aktivitas pengunjung residen di negara referensi. Pariwisata domestik melibatkan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di dalam batas-batas negara tersebut. Keunggulan utama dari pariwisata domestik adalah kemudahan dalam perjalanan karena tidak memerlukan dokumen perjalanan resmi seperti paspor atau visa, serta formalitas yang sering kali memakan waktu seperti pemeriksaan kesehatan wajib dan penukaran valuta asing. Wisata domestik juga menawarkan kesempatan bagi penduduk lokal untuk mengeksplorasi kekayaan budaya dan keindahan alam negaranya sendiri tanpa harus menghadapi hambatan bahasa dan perbedaan budaya yang signifikan. Selain itu, pariwisata domestik dapat menjadi pendorong utama pereko-

nomian lokal karena pengeluaran wisatawan domestik secara langsung berdampak pada bisnis lokal seperti hotel, restoran, dan atraksi wisata.

2 Pariwisata Inbound

Merupakan aktivitas pengunjung non-residen di negara referensi. Pariwisata inbound mengacu pada kedatangan wisatawan asing ke suatu negara. Wisatawan ini berasal dari negara lain dan mengunjungi negara referensi untuk berbagai tujuan seperti liburan, bisnis, atau kunjungan keluarga. Pariwisata inbound memerlukan persiapan yang lebih kompleks dari pihak negara tuan rumah, termasuk pengelolaan dokumen perjalanan seperti visa, pemeriksaan kesehatan, dan penukaran mata uang. Keberhasilan pariwisata inbound sangat bergantung pada promosi yang efektif di pasar internasional, kualitas layanan, dan infrastruktur yang mendukung. Pariwisata inbound memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara tuan rumah karena dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang investasi dalam infrastruktur pariwisata. Selain itu, pariwisata inbound juga berkontribusi pada pertukaran budaya dan pemahaman antar bangsa.

3 Pariwisata Outbound

Merupakan aktivitas pengunjung residen di luar negara referensi. Pariwisata outbound melibatkan penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ini mencakup perjalanan untuk berbagai tujuan seperti liburan, studi, atau bisnis. Wisatawan outbound harus mempersiapkan dokumen perjalanan yang diperlukan, seperti paspor dan visa, serta mematuhi peraturan imigrasi dan kesehatan negara tujuan. Pariwisata outbound memberikan pengalaman yang berharga bagi wisatawan dalam hal mengeksplorasi budaya baru, belajar tentang cara hidup yang berbeda, dan memperluas wawasan mereka. Dari sudut pandang ekonomi, meskipun pariwisata outbound berarti pengeluaran devisa dari negara asal, ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi global dan memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara. Wisatawan *outbound* sering kali membawa kembali pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat berkontribusi pada perkembangan sosial dan budaya di negara asal mereka.

Berikut adalah manfaat ekonomi dari pergerakan wisatawan, (Hall and Williams, 2019) :

1 Pariwisata Dalam Negeri (Internal)

Terdiri dari pariwisata domestik dan pariwisata *in-bound*, yaitu kegiatan pengunjung residen dan non-residen dalam negara referensi sebagai bagian dari perjalanan domestik atau internasional. Pariwisata dalam negeri mencakup semua kegiatan wisata yang dilakukan baik oleh penduduk lokal maupun wisatawan asing di dalam batas negara referensi. Ini berarti pariwisata dalam negeri melibatkan seluruh spektrum aktivitas pariwisata yang terjadi dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh penduduk lokal yang bepergian ke berbagai destinasi di negaranya sendiri maupun oleh wisatawan asing yang mengunjungi negara tersebut. Manfaat ekonomi dari pariwisata dalam negeri meliputi peningkatan pendapatan bagi bisnis lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, pariwisata dalam negeri juga membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata ke berbagai daerah, khususnya daerah-daerah yang mungkin tidak banyak mendapat kunjungan dari wisatawan internasional.

2 Pariwisata Nasional

Terdiri dari pariwisata domestik dan wisata *outbound*, yaitu kegiatan pengunjung penduduk di dalam dan di luar negeri yang menjadi acuan baik sebagai bagian dari perjalanan domestik maupun outbound.

Pariwisata nasional mencakup semua aktivitas wisata yang dilakukan oleh penduduk suatu negara, baik yang bepergian di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ini berarti bahwa pariwisata nasional melibatkan pergerakan penduduk lokal baik sebagai wisatawan domestik yang menjelajahi negaranya sendiri maupun sebagai wisatawan outbound yang melakukan perjalanan ke negara lain. Dari perspektif ekonomi, pariwisata nasional mencerminkan keseluruhan kontribusi ekonomi dari pengeluaran wisatawan domestik dan outbound. Ini termasuk pengeluaran untuk transportasi, akomodasi, makanan, dan hiburan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pariwisata nasional juga mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara, karena tingginya tingkat perjalanan outbound dapat menunjukkan daya beli yang kuat di kalangan penduduk.

3 Pariwisata Internasional

Terdiri dari pariwisata *inbound* dan *outbound*, yaitu kegiatan pengunjung non-residen di negara rujukan pada perjalanan inbound dan kegiatan pengunjung residen di luar negara referensi pada perjalanan outbound. Pariwisata internasional melibatkan semua aktivitas wisata yang melintasi batas negara, baik yang dilakukan oleh wisatawan asing yang masuk ke negara referensi (*inbound*) maupun oleh pendu-

duk lokal yang bepergian ke luar negeri (*outbound*). Pariwisata internasional adalah pendorong utama pertukaran budaya, diplomasi, dan ekonomi antar negara. Dampak ekonomi dari pariwisata internasional sangat signifikan, karena melibatkan penerimaan devisa dari wisatawan asing yang menghabiskan uang di negara referensi, serta pengeluaran devisa oleh penduduk lokal yang berwisata ke luar negeri. Pariwisata internasional juga berdampak pada perdagangan global, investasi asing, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, pariwisata internasional memainkan peran penting dalam promosi negara di panggung global, meningkatkan citra dan daya tarik negara sebagai destinasi wisata yang menarik.

G.DAMPAK PARIWISATA

Pariwisata dan yang terkait erat satu sama lain termasuk di antara perusahaan penghasil pendapatan utama di dunia. Mereka juga berada di antara perusahaan teratas. Ada tren kelas atas dalam pariwisata selama beberapa dekade terakhir karena perjalanan menjadi hal yang umum. Orang bepergian untuk bisnis, liburan, kesenangan, petualangan, atau bahkan perawatan medis. Dengan beberapa aktivitas terkait bisnis yang terkait dengan pariwisata, industri ini memiliki potensi luar biasa untuk menghasilkan lapangan kerja serta menghasilkan devisa. Pariwisata

dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui cara-cara berikut (burgess et al., 2011; Ollivaud and Haxton, 2019):

1. Generasi Pekerjaan Ini menciptakan banyak pekerjaan di antara penyedia layanan langsung (seperti hotel, restoran, agen perjalanan, operator tur, pemandu dan pendamping tur, dll.) Dan di antara penyedia layanan tidak langsung (seperti pemasok ke hotel dan restoran, akomodasi tambahan, dll.
2. Pembangunan infrastruktur Pariwisata memacu pembangunan infrastruktur. Untuk menjadi tujuan komersial atau kesenangan yang penting, lokasi mana pun akan membutuhkan semua infrastruktur yang diperlukan, seperti konektivitas yang baik melalui kereta api, jalan raya, dan transportasi udara, akomodasi yang memadai, restoran, jaringan telekomunikasi yang berkembang dengan baik, dan, fasilitas medis, di antaranya orang lain.
3. Pertukaran asing Orang-orang yang bepergian ke negara lain menghabiskan banyak uang untuk akomodasi, transportasi, tamasya, belanja, dll. Dengan demikian, turis yang masuk merupakan sumber devisa yang penting bagi negara manapun.

H.MANFAAT EKONOMI PARIWISATA

Manfaat yang didapat wisatawan, seperti kontribusi perjalanan kesenangan untuk istirahat dan relaksasi, manfaat pendidikan, pemahaman orang dan budaya lain, serta kesejahteraan fisik dan mental wisatawan. Membangun atau mengembangkan industri pariwisata melibatkan pengeluaran serta keuntungan, biaya, dan manfaat. Jika dampak tersebut dipertimbangkan sejak awal perencanaan, kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan sementara kelemahan dan ancaman dapat diminimalkan. Beberapa manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pariwisata adalah (Hansen et al.,2019):

1. Pariwisata menghasilkan lapangan kerja lokal, langsung di sektor pariwisata dan di sektor pendukung dan pengelolaan sumber daya.
2. Pariwisata mendorong industri domestik yang menguntungkan, hotel dan fasilitas penginapan lainnya, restoran dan pelayanan makanan, sistem transportasi, kerajinan tangan, dan layanan pemandu.
3. Pariwisata menghasilkan devisa negara dan menyuntikkan modal dan uang baru ke dalam ekonomi lokal.

4. Pariwisata membantu mendiversifikasi ekonomi lokal.
5. Peningkatan infrastruktur pariwisata.
6. Meningkatkan pendapatan pajak dari pariwisata

PERAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN

A. PERAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN

Pembangunan adalah segala sesuatu yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Banyak pembangunan yang dapat melibatkan masyarakat, secara khusus pembangunan dalam sektor pariwisata tidak terlepas dari partisipasi dan pela-

yanan masyarakat untuk berperan aktif dan mendukung kemajuan pariwisata di daerahnya.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi pada pembangunan lainnya. Salah satu sektor yang mendapatkan kontribusi terbesar dari pembangunan sektor pariwisata adalah sektor ekonomi. Berbagai pencapaian dalam sektor wisata dapat berkontribusi langsung pada peningkatan ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro. Artinya, bahwa sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara.

Nirwandar (2011) menyatakan bahwa pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental yang sangat berperan dalam pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. Pada dasarnya berperan untuk :

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yaitu dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah wisata akan menambah rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional;

2. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*), yaitu pariwisata memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata;
3. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*), yaitu kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan, sehingga akan mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya
4. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*), yaitu pariwisata memberi kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya, yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah;
5. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Asasi Manusia, yaitu pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern sehingga kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak asasi

- manusia, khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays;
6. Peningkatan Ekonomi dan Industri pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa;
 7. Pengembangan Teknologi Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi, khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini

Peran pariwisata dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat budaya, manfaat lingkungan. Diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat ekonomi, yaitu menambah pendapatan masyarakat dan devisa bagi negara, membuka lapangan kerja baru, menghindarkan atau paling

tidak mengurangi tingkat pengangguran, dan sebagainya;

2. Manfaat sosial, yaitu memupuk rasa cinta tanah air, menghapus kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pengetahuan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keramahtamahan (*hospitality*), dan sebagainya;
3. Manfaat budaya, yaitu memajukan kebudayaan adat istiadat, religi dan seni budaya yang semakin berkembang, mengangkat citra bangsa, memungkinkan asimilasi dan akulturasi budaya, dan sebagainya;
4. Manfaat lingkungan, yaitu melestarikan (*konservasi*) lingkungan, kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan, dan sebagainya.

sektor pariwisata berperan mendatangkan multiplier effect yang sangat besar pada masyarakat setempat, karena seorang wisatawan dalam melakukan *perjalanan* wisata akan membutuhkan banyak jasa pelayanan yang tidak didapatkan dari satu perusahaan saja akan tetapi dari berbagai perusahaan yang menawarkan fungsi dan jenis layanan yang berbeda.

B. PEMASUKAN DEvisa DARI PARIWISATA UNTUK PEMBANGUNAN

Pariwisata seringkali dipersepsikan berperan dalam pembangunan sebagai 'mesin ekonomi' penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Artinya, pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional, seperti peningkatan ekonomi akibat pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan industri-industri baru, peningkatan hasil pertanian dan peternakan, memperluas produk lokal untuk lebih dikenal dunia internasional, dan peningkatan permintaan terhadap *Souvenir Goods*, Art painting dan Handicrafts. Selain itu, pariwisata juga sangat meningkatkan pemasukan devisa negara, pajak, dan pendapatan nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan Aliah (2016) menemukan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang penting untuk dikembangkan dalam pengembangan perekonomian di Indonesia, karena:

1. Sektor pariwisata memiliki peran besar dalam penciptaan nilai tambah faktor produksi, lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan institusi, dan me-

memiliki keterkaitan dengan sektor perekonomian secara keseluruhan.

2. sektor pariwisata memiliki efek multiplier tertinggi, yaitu pada sektor perdagangan, sektor restoran, dan sektor jasa-jasa.
3. Dalam keterkaitan dengan sektor-sektor perekonomian, sektor pariwisata memiliki hubungan sangat erat dengan sektor-sektor hulunya terutama sektor pertanian

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa yang cukup besar bagi perekonomian negara dan sektor pariwisata juga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga akan mendorong adanya perkembangan investasi di daerah tersebut,

C. KEBERHASILAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN

Pada hakekatnya sektor pariwisata perlu dipasarkan dengan baik, agar dikenal semua orang dan semua wisatawan di seluruh dunia baik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisata. keberhasilan pariwisata sangat tergantung pada keberadaan manusia yang terlibat di dalam mengelola pariwisata tersebut karena terwujudnya pariwisata merupa-

kan interaksi dari Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pariwisata sehingga aspek manusia merupakan salah satu yang berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu negara.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan sektor pariwisata. Pentingnya sumber daya manusia di sektor pariwisata adalah manusia (people) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.

Untuk mendukung keberhasilan pariwisata agar memberikan kontribusi bagi pembangunan, maka sektor pariwisata di daerah haruslah dikelola dengan profesional agar daya tarik daerah wisata semakin diminati para wisatawan. Fandeli (1995) menyatakan daya tarik daerah wisata yang akan dikunjungi para wisatawan dibedakan atas 3 bagian, yaitu:

1. Daya Tarik Alam Pariwisata, yaitu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, seper-

- ti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan objek wisata yang masih alami;
2. Daya Tarik Budaya Pariwisata, yaitu merupakan suatu wisata yang dilakukan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya;
 3. Daya Tarik Minat Khusus Pariwisata, yaitu merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatannya lainnya.

Ismayanti (2010) menyatakan bahwa daya tarik wisata dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti flora, fauna, keindahan alam, dan lain-lain.
2. Daya tarik wisata karya manusia, seperti pertunjukan seni budaya, film, museum, dan sebagainya.

KEBIJAKAN DAN REGULASI

A. KEPARIWISATAAN

- (Lempiran)

B. PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN PARIWISATA

Kebijakan pariwisata umumnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwujudkan dalam perencanaan pariwisata. Beberapa faktor kunci yang menjadi perhatian kebijakan ekonomi misalnya 11 ketenagakerjaan, investasi dan keuangan, industri, dan perdagangan (Gee, 2000: 28).

Lebih lanjut Gee (2000:28) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian. Gee (1997: 286) lebih tegas dijelaskan kebijakannya mengacu pada rencana, keseluruhan tingkat tinggi yang mencakup tujuan dan prosedur. Untuk itu kebijakan publik, memperhitungkan hasil akhir yang diinginkan dari pemerintah dan metode untuk mencapai hasil tersebut. Kebijakan mewujudkan tujuan dan strategi yang telah diadopsi pemerintah sehubungan dengan pariwisata, pembangunan ekonomi, pekerjaan, hubungan politik, atau kombinasi dari ketiganya. Karenanya keterlibatan sektor publik sangat penting dalam penentuan kebijakan pariwisata.

Menurut Gun and Var (2002: 106) menyebutkan ruang lingkup kebijakan pariwisata nasional telah menjadi alat promosi untuk menarik kunjungan wisatawan. Kebijakan yang dibuat semua untuk usaha peningkatan citra destinasi wisata. Dalam dekade terakhir kerjasama dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan swasta semakin kuat. Kebijakan pengembangan pariwisata perlu dilaksanakan oleh sektor swasta serta sektor publik. Untuk itu sinergi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan pa-

riwisata. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif tentang kebijakan pariwisata. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus kewajiban untuk membuat, mengimplementasikan dan memelihara dengan baik sebuah kebijakan yang dibuat. Hal yang paling penting adalah koordinasi dengan sektor swasta dan pemerintah untuk menghindari kekhawatiran terhadap kesejahteraan publik (Gun and Var (2002: 117). Menurut Richter & Richter (Michael Hall, 2000;25) hampir secara universal pemerintah di dunia menerima pariwisata yang memiliki dampak positif, sehingga kebijakan pariwisata di buat untuk memperluas industri pariwisata.

Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif keuangan untuk menarik investasi masuk. Insentif ini dapat berupa hibah atau pinjaman yang diberikan untuk proyek-proyek dengan kriteria tertentu. Menurut Theobald (2005), berbagai insentif yang tersedia di bidang pariwisata, dan ini mungkin secara luas diklasifikasikan sebagai berikut insentif keuangan; pengurangan biaya modal; pengurangan biaya operasi, dan investasi keamanan.

Menurut Mill and Morrison (dalam Michael Hall, 2000:27) ada lima bidang utama keterlibatan sektor publik dalam pariwisata yaitu koordinasi, perencanaan, perundang-undangan dan peraturan, kewirausahaan dan stimulasi.

Koordinasi; pariwisata yang terdiri dari berbagai macam sektor sering menimbulkan konflik kepentingan, maka koordinasi dalam pemanfaatan sumber daya sangat penting. Selain itu penyeimbangan berbagai peran dalam proses pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah. Perencanaan; perencanaan pariwisata terjadi dalam bentuk pengembangan, infrastruktur, promosi dan pemasaran, struktur (organisasi yang berbeda-beda) dan skala (internasional, nasional, lokal dan sektoral). Perencanaan pariwisata harus berjalan seiring dengan kebijakan pariwisata. Tetapi dalam pembentukan kebijakan, perencanaan merupakan proses politik yang hasilnya bisa menjadi dominasi bagi kepentingan dan nilai berbagai pihak. Peraturan dan perundang-undangan; pemerintah mempunyai kekuasaan hukum dan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan industri pariwisata. Keterlibatan pemerintah mulai dari kebijakan paspor dan visa, pemanfaatan lahan, tenaga kerja, upah dan lainnya. Stimulasi; pemerintah dapat melakukan stimulasi pariwisata melalui insentif secara finansial seperti pinjaman berbunga rendah (Theobald, 2005). Membiayai penelitian pariwisata, menstimulasi pariwisata melalui pemasaran, promosi, dan pelayanan pada pengunjung. Menurut Middleton (Michael Hall, 2000: 34), pemasaran merupakan fungsi dominan dalam kebijakan penyelenggaraan pariwisata.

Pariwisata berkelanjutan, pariwisata sex, keselamatan perjalanan, pariwisata kesehatan merupakan beberapa faktor yang melibatkan peraturan, perencanaan, kebijakan publik yang terkait dengan pariwisata. Masalah Pariwisata berkelanjutan menjadi suatu kebijakan yang terus akan berkembang searah dengan 13 peningkatan dampak dari pariwisata dunia masa depan akibat pembangunan fasilitas dan tekanan fisik lingkungan (Edgell, Allen, Smith and Swanson, 2008; 69, 332). Dijelaskan pula bahwa pariwisata berkelanjutan akan tetap menjadi isu perencanaan dan kebijakan pada tingkat internasional, regional dan nasional.

1 Komitmen Pemerintah sebagai Dasar Kebijakan

Komitmen pemerintah mempunyai peranan unci terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang pariwisata. Kuat lemahnya derajat komitmen pemerintah suatu negara dalam pembangunan pariwisata mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata (Hermawan, 2002: 19). Lebih lanjut dijelaskan bahwa komitmen pemerintah yang kuat akan mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki, sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin dipercepat dan dioptimalkan. Kegiatan bisnis pariwisata bersifat multisektoral, yang melibatkan berbagai sektor yaitu perhubungan, telekomunikasi,

pekerjaan umum, kesehatan, pertahanan dan keamanan, industri, masyarakat, pemerintah daerah dan sebagainya (Hermawan, 2002: 19). Hal ini memerlukan peran pemerintah untuk melakukan mobilisasi yang mampu menggerakkan seluruh kepentingan pariwisata dari tingkat nasional sampai tingkat masyarakat lokal. Komitmen untuk mensinergikan berbagai kepentingan antar sektor sangat penting disini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Industri pariwisata akan berlangsung tatkala ada sejumlah rangsangan yang menarik, kemudahan perizinan, kepastian usaha, promosi dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan perlindungan dan proteksi yang ketat terhadap industri pariwisata, mengingat pariwisata sangat rentan terhadap berbagai kerusakan lingkungan, tinggalan arkeologi, kesehatan, wabah penyakit dan sebagainya. Majunya industri pariwisata dengan kebijakan yang holistik akan dapat memperkuat ekonomi negara sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gee, 1997: 292; Hermawan, 2002: 19).

Pengembangan pariwisata dengan memberikan peluang pengusaha lokal untuk berinvestasi dalam berbagai industri pariwisata menjadi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Keterlibatan ini akan menunjukkan sensitivitas efek 14 pengembangan

pariwisata terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemerintah menetapkan standar untuk pembangunan pada daerah pariwisata. Ketinggian bangunan tidak melebihi pohon kelapa atau 15 meter, rasio lahan atau area bangunan dengan ruang terbuka hijau, struktur dan desain bangunan sesuai dengan karakter lokal, pemanfaatan produk lokal, dan persyaratan lainnya terkait dengan optimalisasi produk lokal (King and Whitelaw, 1992).

2 Signifikansi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali

Pariwisata adalah sebuah fenomena akibat perjalanan wisata yang merupakan satu sistem terpadu yang memiliki unsur saling terkait. Perubahan pada satu elemen akan sangat berpengaruh pada elemen yang lainnya. Hal ini menyimpulkan bahwa pariwisata berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik (Leiper, 1990; Swarbrooke, 1999). Tingginya tingkat kerjasama, kolaborasi dan integrasi yang diperlukan untuk mencapai pendekatan SHIP (systemic, holistic, interdisipliner, dan partisipatori) untuk pariwisata yang berkelanjutan pada setiap tingkat berarti sudah jelas. Namun tingkat kerjasama, sangat sulit dipahami. Setiap sektor melaksanakan fungsinya dengan baik dalam satu koordinasi kelembagaan. Pariwisata berkelanjutan dalam banyak hal tetap meru-

pakan usaha untuk ajang kompetisi dan distribusi sumber daya yang terbatas, sehingga dalam hal ini, membutuhkan solusi politik. Adanya kesepakatan implementasi tolak ukur yang jelas dari pariwisata berkelanjutan dengan kebijakan berupa regulasi dan instrumen yang tepat. Keseimbangan harus dicapai antara pariwisata dan kegiatan yang ada dan potensi lainnya.

C. KEBIJAKAN DALAM ASPEK EKONOMI

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi telah mampu menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta penguatan daya beli masyarakat. Untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, strategi kebijakannya harus memiliki dua buah tujuan yakni harus memaksimalkan kontribusi dari sumber daya pariwisata yang telah terbukti mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, dan berupaya mengembangkan potensi-potensi ekonomi baru yang belum tergali (Widya Tedja, 2011; 28). Sistem terpadu lingkungan dan ekonomi menjadi entitas dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan ini, Hardy, et all (2002;2-3) merancang sistem akuntansi yang memasukkan isu-isu lingkungan dan sosial budaya menjadi sistem ekonomi ekologi yang holistik.

Ekonomi ekologi yang mengawali pengintegrasian berbagai disiplin ilmu tentang pembangunan berkelanjutan.

Implementasi pembangunan berkelanjutan menekankan pada dua strategi yang harus diwujudkan dalam peningkatan nilai ekonomi masyarakat, yaitu pertama menciptakan simbiosis mutualisme antara pariwisata, pertanian dan kelautan. Semua hasil pertanian dan kelautan yang diperoleh harus dikemas dan dipasarkan sesuai dengan standar bisnis internasional untuk menunjang keunikan pariwisata yang dimiliki. Sebaliknya konstruksi ekonomi harus diarahkan pada kesejahteraan petani dan nelayan yang termarginalisasi. Untuk mewujudkan ini harus dilakukan good corporate governance usaha pariwisata yaitu transparansi, fase governance structure, proses dan governance outcome sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi pariwisata. Kedua, memanfaatkan peluang usaha pariwisata yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Berbagai produk wisata seperti wisata religi, wisata konvensi, wisata alam, dan lainnya. Peluang ini sudah didukung oleh adanya pergeseran pasar dari pola konsumsi massal ke wisata yang minat khusus dan berwawasan lingkungan. Pada sisi lain yang menjadi skala prioritas adalah mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Apabila hal ini terealisasi,

maka masa depan pariwisata akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dan memiliki posisi yang sejajar dengan pergaulan pariwisata internasional. Apalagi diperkuat dengan kombinasi bisnis modern, maka pariwisata tidak hanya mampu mempertahankan pasar tetapi, memelihara peluang dalam meningkatkan penetrasi pasar pariwisata akibat liberalisasi jasa.

D.KEBERLANJUTAN DALAM ASPEK SOSIAL BUDAYA

Pariwisata telah menjadi sektor yang menyebabkan interaksi dan mobilitas masyarakat lokal dan dunia yang berakibat pada persentuhan dan percampuran budaya, antar etnik dan antarbangsa. Wisatawan datang dengan budaya yang notabene berbeda dengan budaya lokal. Hal ini menimbulkan patogen sosial dan kerawanan konflik. Untuk itu, penekanan dalam perspektif kebijakan publik harus bertujuan pada pembentukan ketahanan budaya, pemantapan integrasi sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal. Perhatian terhadap aspek sosial budaya dalam pariwisata masih sangat rendah. Hal ini disebabkan berbagai ukuran atau indikator yang digunakan adalah performance indicator yang diukur secara statistik atau kuantitatif. Sementara itu sebagian dari isu sosial budaya bersifat kualitatif sehingga tidak termasuk dalam indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian cukup

beralasan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak memberikan perhatian serius terhadap aspek sosial budaya mengingat tidak adanya ukuran yang pasti dalam menemukan hubungan sebab akibat dari berbagai fenomena sosial budaya tersebut.

Adanya ketimpangan kondisi seperti di atas, perlu adanya kebijakan yang mewajibkan para pelaku usaha pariwisata memprioritaskan dan melestarikan keunikan budaya sekaligus optimalisasi peran masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal tidak dapat diabaikan, justru dioptimalkan karena pada masyarakat melekat keunikan dan keragaman budaya dalam menciptakan identitas dan jati diri, sebagai bagian dari pengembangan pariwisata secara inklusif. Proses pemberdayaan bertujuan pula dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan spiritual sehingga mampu mencapai kemampuan intelektual masyarakat yang adil dan beradab. Kebijakan ini dapat diderivasi melalui pembuatan kebijakan pariwisata dengan membuat event pariwisata seperti festival dengan mengedepankan atraksi budaya yang dimiliki, dan melibatkan masyarakat internasional sebagai media promosi dan diplomasi antara masyarakat lokal dan dunia internasional. Kombinasi atau kolaborasi dari upaya diatas akan menjadi embrio bagi terbentuknya sebuah citra positif dan identitas pariwisata yang solid. Ini sangat krusial, yang mana keputusan perjalanan wisata ditentukan oleh citra dan identitas dari

suatu daerah tujuan wisata. Selain itu dalam globalisasi penguatan kredibilitas pariwisata merupakan kolaborasi positif yang menjadi bagian dari diplomasi pariwisata. Keberhasilan pelestarian budaya dalam pariwisata maka keberhasilan pada pembangunan berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

E. KEBERLANJUTAN DALAM ASPEK LINGKUNGAN

Pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan, para pelaku pariwisata (pemerintah, dan swasta) wajib mengedepankan gerakan pengendalian terhadap dampak merusak (*detrimental effect*) pariwisata. Pariwisata yang acapkali memanfaatkan lingkungan sebagai atraksi dan pembangunan, sudah selayaknya selalu memberi perhatian pada perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, demi kepentingan generasi yang akan datang. Perhatian terhadap eksistensi lingkungan hidup juga merupakan aktualisasi pengakuan terhadap nilai-nilai *civil society*.

Strategi kebijakan pada aspek lingkungan hidup dapat bersifat preventif dan represif dengan melibatkan seluruh stakeholders dari pariwisata. Secara preventif, dilakukan dengan pembuatan cetak biru (*blueprint*) standarisasi lingkungan hidup. Kebijakan ini menjadi pedoman, kriteria, prosedur teknis dan penetapan kinerja bagi pelaku pariwisata dalam mengelola dan mempertahankan ek-

sistensi usaha pariwisata di masa depan, sekaligus mengedepankan perlindungan atau konservasi terhadap lingkungan hidup. Kebijakan yang menetapkan daerah konservasi alam seperti pantai, danau, hutan dan warisan budaya akan mampu mereduksi dampak negatif dari komersialisasi pariwisata. Konstruksi kebijakan ini akan membatasi kecenderungan alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan aktivitas bisnis yang menyalahi tata letak dan tata ruang. Kebijakan preventif kalau tidak diikuti oleh kebijakan represif, akan sia-sia.

Tindakan tegas dan tidak memihak terhadap pelaku pariwisata yang terbukti melawan hukum melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, harus di-kedepankan. Upaya represif dapat bersifat administratif, yaitu peringatan, paksaan, serta pencabutan izin dari pemerintah, sedangkan untuk pelanggaran hukum berat dapat dilakukan dengan pidana.

EVALUASI KEBIJA- KAN PENGEMBAN- GAN PARIWISATA

A. KONSEP PARIWISATA DALAM PANDANGAN TEOLOGIS

Pariwisata merupakan gejala kemanusiaan, artinya pariwisata terjadi kepada manusia semua kelas sosial, dari kelas bawah, menengah dan atas. Apa yang mendorong manusia melakukan perjalanan wisata. Kajian teologis dan filosofis (teori filsafat) bahwa pariwisata merupakan tindakan eksistensi manusia yang memiliki landasan nilai, sehingga pariwisata pada hakikatnya adalah pergerakan fitrah manusia yang memiliki tujuan. Teori ini dapat ditarik sebuah konsep bahwa pariwisata adalah perjalanan yang memiliki landasan nilai agama, sosial, Pendidikan, politik, kebudayaan, dan ekonomi. Kajian kritis pergerakan pari-

wisata yang terjadi kepada manusia dari berbagai lapisan sosial manusia dan nilai hakikat pariwisata, oleh karenanya diperlukan paradigma yang dijadikan cara pandang untuk membuat konsep kebijakan pengembangan pariwisata yang dapat memberikan kemanfaatan bagi semua kelas sosial sesuai dengan eksistensi manusia. Pendekatan ekonomi pariwisata sebagai salah satu variabel pariwisata bertujuan diperlukan konstruksi paradigma pengembangan pariwisata.

B. PARIWISATA RELIGIUS

Pariwisata religius melibatkan perjalanan ke tempat-tempat suci atau situs religius untuk tujuan ibadah, refleksi spiritual, atau pendarahan. Tujuan utama dari pariwisata religius adalah mencari kedamaian batin, pencerahan spiritual, dan memperdalam iman. Tempat-tempat seperti Yerusalem, Mekah, dan Varanasi adalah contoh destinasi yang menarik wisatawan religius dari seluruh dunia.

C. ETIKA PARIWISATA DALAM AGAMA

Etika pariwisata dalam pandangan teologis menekankan perlunya perilaku etis dan bertanggung jawab selama berwisata. Ini mencakup penghormatan terhadap budaya dan tradisi lokal, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Agama seringkali memberikan pedoman

moral tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan alam saat bepergian.

D. PARIWISATA SPIRITUAL

Pariwisata spiritual berfokus pada pencarian makna dan kesejahteraan batin melalui perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap memiliki energi spiritual atau makna khusus. Ini bisa mencakup retreat di biara, meditasi di pegunungan, atau kunjungan ke tempat-tempat dengan keindahan alam yang mempesona. Praktik seperti meditasi, yoga, dan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan spiritual sering menjadi bagian dari pariwisata spiritual.

E. KEBERLANJUTAN ANTAR BUDAYA DAN DIALOG ANTAR AGAMA

Pariwisata dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat dialog antaragama dan interaksi antarbudaya. Melalui kunjungan ke situs-situs religius dari berbagai tradisi, wisatawan dapat belajar tentang kepercayaan lain dan mengembangkan pemahaman yang lebih besar. Pariwisata yang berorientasi pada dialog antaragama dapat mendorong toleransi dan kerjasama antara komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda.

F. KONSEP PARIWISATA DALAM PANDANGAN FILOSOFI

Dalam pandangan filosofis, pariwisata dapat dipahami sebagai pencarian makna, keindahan, dan pertukaran sosial. Perspektif ini melihat pariwisata tidak hanya sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai pengalaman yang mendalam yang melibatkan refleksi tentang diri, nilai-nilai, dan hubungan dengan dunia. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa konsep kunci dalam pandangan filosofis tentang pariwisata:

1 Eksistensialisme dan Pengalaman Otentik

Eksistensialisme, seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger, berfokus pada pencarian makna dan otentisitas dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pariwisata, ini berarti mencari pengalaman yang melampaui rutinitas sehari-hari dan memungkinkan wisatawan merasa lebih hidup. Pariwisata menawarkan kesempatan untuk menghadapi pengalaman baru yang bisa memperdalam pemahaman tentang diri dan dunia. Wisatawan sering kali mencari destinasi dan aktivitas yang memberikan makna pribadi, memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar hiburan atau relaksasi.

2 Estetika dan Keindahan

Menurut Immanuel Kant, pengalaman estetis dan keindahan merupakan aspek penting dari kehidupan manusia. Dalam pariwisata, ini tercermin dalam pencarian keindahan alam, arsitektur, dan seni yang mempengaruhi emosi dan perspektif wisatawan. Pariwisata sering melibatkan kunjungan ke tempat-tempat yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan atau karya seni yang menginspirasi, memberikan pengalaman estetis yang mendalam.

3 Etika Pariwisata

Dari perspektif etika, pariwisata melibatkan pertimbangan tentang bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain dan lingkungan. Etika pariwisata menekankan pentingnya perilaku yang bertanggung jawab, termasuk menghormati budaya lokal, melestarikan lingkungan, dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat yang dikunjungi. Ini terkait dengan pandangan moral Immanuel Kant tentang tindakan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal.

G.KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEADILAN

Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis keadilan berfokus pada menciptakan sistem pariwisata yang adil dan inklusif, di mana manfaat dari pariwisata didistribusikan secara merata di antara semua pihak yang terlibat, dan dampak negatifnya diminimalkan. Pendekatan ini memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk komunitas lokal, pekerja, dan pengunjung, mendapatkan keuntungan yang adil dan setara dari aktivitas pariwisata. Prinsip utama kebijakan pengembangan pariwisata berbasis keadilan :

1 Pemberdayaan Komunitas Lokal

1. Konsep: Memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi bagian integral dari pengembangan pariwisata. Ini mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap peluang ekonomi, dan partisipasi dalam manfaat pariwisata.
2. Kebijakan:
 - a. Keterlibatan dalam Perencanaan: Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan proyek pariwisata.

- b. Dukungan Usaha Lokal: Memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat lokal, seperti kerajinan tangan dan restoran.
 - c. Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam industri pariwisata.
3. Contoh: Proyek pariwisata komunitas yang mengizinkan penduduk setempat untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari atraksi wisata.

2 Keadilan Ekonomi

- 1. Konsep: Memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata didistribusikan secara adil, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat.
- 2. Kebijakan:
 - a. Pendapatan Berbasis Pajak dan Retribusi: Menggunakan pendapatan dari sektor pariwisata untuk mendanai program sosial dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.
 - b. Regulasi Upah dan Kondisi Kerja: Menetapkan standar upah dan kondisi kerja yang adil bagi pekerja pariwisata.

3. Contoh: Kebijakan yang memastikan bahwa pajak dari hotel dan restoran digunakan untuk mendanai proyek-proyek komunitas.

3 Pelestarian Budaya dan Lingkungan

1. Konsep: Melindungi dan melestarikan budaya lokal serta lingkungan alam sebagai bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Kebijakan:
 - a. Pelestarian Warisan Budaya: Mendukung upaya pelestarian situs-situs sejarah dan praktik budaya lokal yang penting.
 - b. Regulasi Lingkungan: Menerapkan standar lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas pariwisata, seperti pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem.
3. Contoh: Kebijakan yang mempromosikan ekowisata dan mengatur pembangunan untuk melindungi situs warisan dunia.

4 4. Akses dan Kesetaraan

1. Konsep: Memastikan akses yang setara ke manfaat pariwisata bagi semua anggota masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan.
2. Kebijakan:

- a. Aksesibilitas Fisik: Meningkatkan aksesibilitas bagi wisatawan dengan disabilitas dan memastikan bahwa fasilitas pariwisata ramah disabilitas.
 - b. Kesejahteraan Sosial: Menyediakan dukungan untuk kelompok masyarakat yang mungkin tidak langsung mendapatkan manfaat dari pariwisata.
3. Contoh: Kebijakan yang menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas, dan program yang mendukung kesejahteraan sosial.

5 Pengawasan dan Akuntabilitas

1. Konsep: Menyediakan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi dampak pariwisata serta memastikan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan.
2. Kebijakan:
 - a. Sistem Pelaporan dan Evaluasi: Mengembangkan sistem untuk melacak dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pariwisata.
 - b. Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan pariwisata.

3. Contoh: Laporan tahunan tentang dampak pariwisata dan forum komunitas untuk membahas hasil evaluasi.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PARIWISA- TA

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Hamid, 2018) dalam (Habid, Muhammad 2021) menyatakan bahwa Konsep «pemberdayaan» berasal dari kata «daya,» yang berarti «kekuatan,» dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris «empowerment.» Dalam hal ini, pemberdayaan berarti memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Konsep pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) muncul sebagai respons terhadap kegagalan konsep pembangunan (*development*) yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru, serta di beberapa negara berkembang Asia lainnya. Paradigma pembangunan yang diusung oleh ekonomi neoklasik sangat mengagungkan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect (efek rambatan), namun kenyataannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat hadir sebagai alternatif dari konsep pembangunan yang tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan (Nugroho, 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Pemberdayaan merupakan bagian dari adanya kegiatan yang dinamis, berkelanjutan dan mendorong partisipasi seluruh potensi yang ada secara evolusioner dengan partisipasi seluruh potensi. (Suhendra, 2006).

Salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah model ABCD (*Asset Based Community Development*). ABCD adalah metode pemberdayaan yang menitikberatkan pada penggunaan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas setempat (Maulana, 2019). Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai aset penting bagi desa. Setiap kelompok seperti karang taruna, PKK, dan lain sebagainya dapat diidentifikasi keterampilan atau potensinya, kemudian diberikan sarana untuk dikembangkan dan diberdayakan, sehingga dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai sosial maupun ekonomi.

B. INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata adalah proses di mana individu dan komunitas lokal memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan untuk mengambil kendali dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata :

1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek pariwisata: Menyusun laporan tahunan mengenai partisipasi masyarakat yang mencakup jumlah peserta, latar belakang demografis, dan kontribusi mereka dalam perencanaan.
- b. Jumlah dan kualitas pertemuan komunitas dan konsultasi publik yang diadakan: Menilai efektivitas pertemuan melalui survei kepuasan peserta dan tindak lanjut dari hasil pertemuan.
- c. Representasi komunitas lokal dalam komite atau dewan pariwisata: Melakukan audit periodik terhadap komite atau dewan pariwisata untuk memastikan keberagaman dan inklusivitas representasi.

2 Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan:

- a. Jumlah dan jenis pelatihan yang diadakan untuk masyarakat lokal: Mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat dengan topik seperti pemasaran digital, pengelolaan homestay, dan layanan pelanggan.
- b. Persentase masyarakat yang mengikuti program pelatihan dan peningkatan keterampilan:

Mengidentifikasi hambatan partisipasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan, seperti penjadwalan yang lebih fleksibel atau menyediakan dukungan transportasi.

- c. Tingkat peningkatan keterampilan dan pengetahuan setelah pelatihan: Menggunakan metode evaluasi seperti uji kompetensi dan proyek praktik untuk mengukur peningkatan keterampilan peserta.

3 Akses terhadap Informasi dan Sumber Daya:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi mengenai peluang dan dampak pariwisata: Mendirikan pusat informasi pariwisata di lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Tingkat kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait proyek pariwisata: Menyenggarakan seminar dan workshop reguler yang membahas hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks pariwisata.
- c. Akses masyarakat lokal terhadap sumber daya finansial, teknis, dan material: Menyediakan program pembiayaan mikro dan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mendukung inisiatif lokal dalam pariwisata.

4 Keberlanjutan Ekonomi Lokal:

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata: Melakukan survei tahunan untuk mengukur dampak ekonomi pariwisata terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan.
- b. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang dari sektor pariwisata: Mendorong pembentukan asosiasi UMKM pariwisata yang dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan.
- c. Diversifikasi sumber pendapatan komunitas lokal terkait pariwisata: Menyusun program pengembangan produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan jasa pemandu wisata.

5 Peningkatan Kualitas Hidup:

- a. Perubahan dalam indikator kesehatan dan pendidikan masyarakat lokal: Menyusun program kolaboratif antara sektor pariwisata dan layanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan: Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dasar dan mengaloka-

sikan dana dari pendapatan pariwisata untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas.

- c. Peningkatan infrastruktur lokal sebagai hasil dari proyek pariwisata: Mengembangkan proyek infrastruktur berkelanjutan seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan komunikasi yang mendukung aktivitas pariwisata.

6 Keadilan dan Inklusi Sosial:

- a. Tingkat inklusi kelompok marginal dan rentan dalam proses pembangunan pariwisata: Melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi untuk memastikan partisipasi kelompok rentan.
- b. Kesetaraan gender dalam partisipasi dan manfaat dari proyek pariwisata: Menerapkan kebijakan afirmatif yang memastikan representasi dan keterlibatan perempuan dalam semua aspek proyek pariwisata.
- c. Penurunan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di komunitas lokal: Menyusun program pengembangan keterampilan khusus untuk kelompok rentan guna meningkatkan peluang ekonomi mereka.

7 Kesadaran dan Konservasi Lingkungan:

- a. Partisipasi masyarakat dalam inisiatif konservasi lingkungan: Mendorong inisiatif masyarakat seperti kelompok peduli lingkungan yang aktif dalam program reboisasi, pembersihan pantai, dan pendidikan lingkungan.
- b. Penggunaan praktik berkelanjutan oleh masyarakat dalam kegiatan pariwisata: Memberikan insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti sertifikasi hijau.
- c. Peningkatan kesadaran lingkungan dan tindakan konservasi di tingkat komunitas: Mengadakan kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan sekolah, organisasi pemuda, dan kelompok komunitas.

8 Perubahan Sosial dan Budaya:

- a. Penguatan identitas budaya dan tradisi lokal melalui pariwisata: Mengembangkan festival budaya lokal yang menampilkan seni, musik, tarian, dan kuliner khas sebagai daya tarik wisata.
- b. Penurunan konflik sosial terkait dengan proyek pariwisata: Membangun mekanisme mediasi dan dialog yang melibatkan semua pemangku

kepentingan untuk menyelesaikan konflik yang muncul.

- c. Peningkatan kebanggaan dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan warisan lokal: Mendorong program pendidikan budaya di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap warisan budaya.

9 Pengukuran Dampak dan Umpan Balik:

- a. Sistem untuk mengukur dan mengevaluasi dampak proyek pariwisata terhadap masyarakat lokal: Mengembangkan indikator kinerja utama (KPI) yang spesifik untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan proyek pariwisata.
- b. Mekanisme umpan balik yang efektif dan responsif terhadap keluhan dan saran dari masyarakat: Menyediakan platform online dan hotline khusus untuk menerima keluhan dan saran 2021n, serta memastikan tanggapan yang cepat dan transparan.
- c. Perubahan kebijakan atau praktik berdasarkan umpan balik masyarakat: Mengadakan pertemuan reguler dengan pemangku kepentingan untuk membahas umpan balik yang diterima

dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pustaka

- Ashoer, M., Revida, E., Dewi, I. K., Simarmata, M. M., Nasrullah, N., Mistriani, N., ... & Simarmata, H. M. P. (2021). *Ekonomi Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Baiquni, M., 2009, *Pariwisata dan Krisis Lingkungan Global dalam buku Pariwisata berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, Denpasar: Udayana Press.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2018). *Tourism: Principles and Practice* (6th ed.). Pearson Education Limited.
- Cornia, G. A., Rosignoli, S., & Sacco, L. (2016). *The Impact of Tourism on Economic Growth: An Empirical Analysis for Panel Data*. University of Florence.
- Dallen, T. J., & Boyd, S. W. (2017). *Tourism and Culture: An*

Applied Perspective. Channel View Publications.

Dallen, T. J., & Boyd, S. W. (2017). *Tourism and Culture: An Applied Perspective*. Channel View Publications.

Deng, J., & Jiang, Y. (2016). The Role of Environmental Education in Sustainable Tourism Development: A Literature Review. *Journal of Service Science and Management*, 9(1), 24-36. doi:10.4236/jssm.2016.91004

Disparda.Bali Prov. (2022). Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Bali. <https://disparda.baliprov.go.id/wpcontent/uploads/2022/02/2020perda0051005.pdf>

Fachrurrazi, M. R., & Santoso, B. (2021). Development of Sustainable Tourism Policy: A Literature Review. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 721, No. 1, p. 012014). IOP Publishing

Habib,Muhammad. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*. 1(2), 82-110.

Herdiana, D. (2019). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Magister Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 63-86.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_62

dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf

JDIH Pemerintahan Provinsi Bali. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/14516>

Kepariwisata. (2009). Undang-Undang Tentang Kepariwisata <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/527>

Lea, J. (1998). *The Ethics of Tourism Development*. Routledge.

Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, IV(2), 259-278.

McKercher, Bob, and Du Cros, Hilary. *Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management*. Routledge, 2020.

Nasution, R. F., & Alrazi, B. (2020). Penanganan Dampak Negatif dan Pengurangan Risiko dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 179-195.

Nurhayati, N., Prasetyo, P. K., & Hasyim, C. (2019). Pengembangan Program Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan Berkelanjutan dalam Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Pariwisata*, 7(2), 213-

- Nugroho, Riant, 2018, Kebijakan Pariwisata Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3).
- Sharpley, R., & Telfer, D. J. (Eds.). (2002). *Tourism and Development: Concepts and Issues*. Channel View Publications.
- Timothy, D. J., & Olsen, D. H. (Eds.). (2006). *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*. Routledge.
- Prathama, A., Nuraini, R. E., & Firdausi, Y. (2020). PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN (STUDI KASUS WISATA ALAM WADUK GONDANG DI KABUPATEN LAMONGAN). *Jurnal*
- Widanti, N. P. T. (2022). Khazanah Ekoleksikon <Green Di Green School Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 12(02), 378-402.
- Purwaningsih, Y. (2017). Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(1), 1-11.
- Yoety, Oka, A, 2016, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta Timur, Balai Pustaka.

Lampiran

UU No. 10, Ln 2009/NO. 11 , Tln. No. 4966, LI Setneg : 59
Hlm

- Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata-an tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti, dengan memben-tuk Undang-Undang Kepariwisata-an yang baru.

- Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali.

Menimbang : a. bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali, yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global;

- b. bahwa pembangunan kepariwisataan Bali bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud cita-cita kepariwisataan untuk Bali dan bukan Bali untuk kepariwisataan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan kepariwisataan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Budaya Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Gubernur Bali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali .

Menimbang :a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Saat Kerti Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;

- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Budaya Bali diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kertih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);